

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 380 ayat (1) Bupati/walikota sebagai Kepala Daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD Kabupaten/Kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD) sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasarkan Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada ayat (4). Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat

pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, kelembagaan daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan daerah kabupaten/kota, pembangunan daerah kabupaten/kota, pelayanan publik di Daerah kabupaten/kota, kerja sama daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah kabupaten/kota.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Daerah berdasarkan kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023. Sampai saat ini Inspektorat Daerah sudah melaksanakan pengawasan yang terkait langsung dengan kebijakan nasional diantaranya peningkatan kapabilitas Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kegiatan Saber Pungli.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, diperlukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan

fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati Bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD.
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah **“Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”** yang akan dicapai dengan empat sasaran pembangunan daerah, meliputi :

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis

Isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 yang masih menjadi perhatian utama adalah berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu salah satunya adalah isu

kemiskinan. Isu tersebut berkaitan dengan isu strategis lainnya yang masih menjadi perhatian dalam pembangunan daerah Jawa Tengah di tahun 2024. Isu strategis tersebut sebagai berikut:

1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif
3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Kaitan Tata Kelola pemerintahan yang dinamis adalah Perubahan paradigma reformasi birokrasi tersebut menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan pola pikir sumber daya aparatur, yang secara simultan menuntut adanya proses adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama pada proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajemen organisasi berbasis risiko, riset, dan inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan), digitalisasi pemerintahan, dan penguatan pelayanan publik. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerjasama baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Kinerja tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah digambarkan dengan membaiknya Indeks Reformasi Birokrasi, yang pada tahun 2021 sebesar 78,79 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 77,05. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administrasi, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan daerah terutama penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas lingkungan hidup yang memadai.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia

yang berkualitas”, yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2024.

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada :
 - a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui :
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
 - 3) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - 4) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
 - 5) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;

- 6) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah.
- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui :
- 1) Peningkatan pelayanan perijinan, akses permodalan, subsidibunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - 2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
 - 3) Pemenuhan kebutuhan layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi sarana prasarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas Puskesmas;
 - 4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan.
- c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.
- d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan

angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi.

- e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada :
- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, Anak Tidak Sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas stakeholder, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS.
 - b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan *baseline* data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi; digitalisasi layanan di faskes primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta KLB/Krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasyankes dalam pemberian layanan prioritas

untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas.

- c. Meningkatkan kesadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet.
 - d. Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid.
 - e. Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda.
 - f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat.
 - g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender.
 - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung, fokus pada :

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan lahan berbasis masyarakat, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif.
- c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan sarana prasarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir.
- d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi

kebencanaan, sistem peringatan dini/Early Warning System (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster

- e. penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.
4. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada :
- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesejangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT.
 - b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antar pemerintah, dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah.

Kebijakan Nasional dan Propinsi tersebut yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah **“Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi”**. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Daerah memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 yang ingin dicapai Kabupaten Karanganyar dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Inspektorat Daerah. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026) ke depan diharapkan Inspektorat Daerah akan dapat mencapai sasaran strategis. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP OPD;
- b. Meningkatkan maturitas SPIP, dengan indikator sasaran Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat Daerah, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah **Misi Ketiga Bupati yaitu Meningkatkan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik (*good government*)**.

Dalam hal mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian internal mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan sesuai peran APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting partner*, untuk mewujudkan unit-unit kerja yang bersih dan bebas KKN dan mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah di Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kelurahan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi yaitu:

1. Perencanaan Program Pengawasan;
2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Berdasarkan dokumen RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah.

Mengacu pada *grand design* 8 area perubahan pada reformasi birokrasi yaitu :

a. Manajemen perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

c. Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi kementerian / lembaga / pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

d. Penataan ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,

efisien dan terukur pada masing-masing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Program ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

f. Penguatan pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.

g. Penguatan akuntabilitas kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).

h. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan

dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah fokus terhadap poin (f), yaitu Penguatan Pengawasan, dan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dijelaskan bahwa pada tahun 2024 diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme, maka dalam RENSTRA 2024-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 3 (tiga) tahun sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah **“Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi”** dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

2. Sasaran

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP OPD dan Meningkatkan maturitas SPIP, dengan indikator sasaran Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	78	78	79	80	80	80
		2. Meningkatkan maturitas SPIP	1. Maturitas SPIP	Level	2,87	3	3	3	3	3
			2. Kapabilitas APIP	Level	2,24	3	3	3	3	3

3.3 Tantangan dan Peluang Inspektorat Daerah

Dengan diterapkannya otonomi daerah mengakibatkan beban tugas Lembaga Pengawas Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah) semakin luas dan kompleks sedangkan sumber daya aparatur baik secara kuantitas relatif masih kurang, disamping itu Kabupaten Karanganyar memiliki wilayah yang luas sehingga pelaksanaan pengawasan yang memadai dengan beban kerja yang dihadapi menjadi kurang optimal, disamping itu pula peraturan perundang-undangan yang semakin berkembang dan berubah-ubah khususnya dalam hal tata kelola kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana dan prasarana, berpengaruh terhadap pemahaman para *stakeholder* baik sebagai pelaku yang menjalankan regulasi maupun sebagai pelaku yang memiliki tugas kontrol (pengawasan). Adapun secara rinci tantangan terhadap pengembangan pelayanan di bidang pengawasan dan pembinaan atas tata Kelola pemerintahan di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya pejabat fungsional secara kuantitas yang tidak sepadan/sebanding dengan objek pengawasan (Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan), sehingga memiliki resiko kerja yang tinggi.

Dalam penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Internal, Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan sebanyak 80 obrik, Reviu LKPD dan Laporan Keuangan sebanyak 10 OPD Sample, Reviu RKA dan RKAP sebanyak 42 OPD dan Evaluasi SAKIP sebanyak 41 OPD.

Dalam penyusunan Tim untuk melakukan pemeriksaan tidak berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, namun berdasarkan kompetensi yang dimiliki, termasuk penunjukan Pengawas/Pemeriksa sebagai Pengendali Teknis dan Ketua Tim. Dari data kepegawaian Tahun 2023, jumlah SDM sebagai Pengawas/Pemeriksa sebanyak 33 orang terdiri dari 23 orang Auditor, 6 orang P2UPD. Pengawas/Pemeriksa bersertifikat sebanyak 27 orang dan yang belum bersertifikat sebanyak 6 orang, sedangkan Pengawas/Pemeriksa sebagai Pengendali Teknis dan

Ketua Tim yang bersertifikat sebanyak 24 orang, terdiri dari : Pengendali Teknis sebanyak 10 orang dan Ketua Tim sebanyak 14 orang. Dengan minimnya jumlah Pengawas/Pemeriksa yang melaksanakan tugas, dengan pengiriman SDM mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi akan mengurangi jumlah SDM dan berdampak pada kualitas hasil pengawasan.

Upaya mengatasi kekurangan jumlah Pengawas/Pemeriksa dibandingkan target dan sasaran pengawasan setahun dengan cara mengikutsertakan SDM Pengawas/JFU pada Sekretariat, dan terkadang untuk kasus-kasus *emergency* mengambil personil yang sedang bertugas (*overlapp*) tugas.

2. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang bagi pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan, diantaranya kendaraan dinas operasional yang memadai dan alat uji pemeriksaan fisik, hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Inspektorat Daerah terhadap Objek Pengawasan.

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat Daerah.

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat Daerah ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

2. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah

Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

3. Sumber Daya Manusia yang berintegritas.

Inspektorat Daerah telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perumusan Program dan Kegiatan disertai Target dan Pendanaan

Dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam usulan renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 diproyeksi bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Proyeksi pendanaan tersebut merupakan usulan SKPD yang bersumber dari dokumen perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 dapat dijelaskan melalui uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 3) Evaluasi Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD;

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Penyediaan Bahan/Material;
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya;

- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 3) Reviu Laporan Kinerja;
- 4) Reviu Laporan Keuangan;
- 5) Pengawasan Desa;
- 6) Kerjasama Pengawasan Internal;
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

b. Pendampingan dan Asistensi.

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Program dan kegiatan yang direncanakan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Hal ini dikarenakan seluruh target kegiatan yang akan dilaksanakan sudah diperhitungkan dengan matang dan sesuai dengan dokumen perencanaan baik RPD maupun Renstra.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (*outcomes*)/kegiatan (*output*) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Inspektorat Daerah								13.859.700.000,00				14.678.045.292,00	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								13.859.700.000,00				14.678.045.292,00	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH								13.859.700.000,00				14.678.045.292,00	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11.871.982.100,00				11.146.045.292,00	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7.750.000,00				25.000.000,00	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	3 Dokumen	100 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000,00
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Terwujudnya Tertib Perencanaan,	Kab. Karanganyar, Semua	79 Nilai	1 Laporan	100 %	5.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000,00
							Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kecamatan, Semua Kel/Desa									
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	2 Laporan	100 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6.713.607.500,00					7.320.445.292,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	48 Orang/bulan	100 %	6.700.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	7.277.445.292,00
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	2 Dokumen	100 %	7.635.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	22.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	12 Dokumen	100 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	1 Dokumen	100 %	4.115.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	1 Laporan	100 %	428.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	14 Laporan	100 %	428.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	5.000.000,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1.848.000,00					375.000.000,00
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	48 Orang	100 %	1.848.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	375.000.000,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								275.195.000,00					820.600.000,00
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	1 Paket	100 %	4.045.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	1 Paket	100 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	1 Paket	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	72.600.000,00
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	2 Dokumen	100 %	1.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000,00
6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	1 Paket	100 %	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	95.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	12 Laporan	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	90.000.000,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	12 Laporan	100 %	85.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000,00
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	1200 Dokumen	100 %	19.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen	55.000.000,00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								4.300.000.000,00					1.800.000.000,00
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	3 Unit	100 %	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.000.000.000,00
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	1 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	300.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	1 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	1 Unit	100 %	4.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	20 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	350.000.000,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								157.144.100,00					355.000.000,00
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	12 Laporan	100 %	34.344.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	55.000.000,00
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	12 Laporan	100 %	122.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								416.437.500,00					450.000.000,00
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	27 Unit	100 %	333.387.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	300.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prosentase Jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	15 Unit	100 %	26.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	60.000.000,00
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase Jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	1 Unit	100 %	45.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000,00
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase Jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Nilai	20 Unit	100 %	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	30.000.000,00
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							1.477.646.800,00				2.480.000.000,00	
6	01	02	2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal							1.332.316.800,00				2.110.000.000,00	
6	01	02	2.01	0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah												
						LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	16 Laporan	100 %	81.471.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	220.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
					LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	56 Laporan	100 %	271.370.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	56 Laporan	385.000.000,00	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja													
					LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	42 Laporan	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	42 Laporan	110.000.000,00	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	41 Laporan	100 %	97.124.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	41 Laporan	270.000.000,00
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa													
						LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	32 Laporan	100 %	230.091.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 Laporan	275.000.000,00
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						LHR LKPD Prosentase jumlah aduan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	1 Kesepakatan	100 %	194.623.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	300.000.000,00
						yang ditindaklanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan												
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
						LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	42 Dokumen	100 %	407.636.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	42 Dokumen	550.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								145.330.000,00				370.000.000,00	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													
						Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti LHR LKPD Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 1 Laporan 10 % 95 %	20 Laporan	100 %	50.330.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	20 Laporan	120.000.000,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti LHR LKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 1 Laporan 10 % 95 %	12 Laporan	100 %	95.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	250.000.000,00
						Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan												
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								510.071.100,00					1.052.000.000,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								68.551.700,00					187.000.000,00
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target			
						Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	1 Rekomendasi	100 %	23.828.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	77.000.000,00	
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
						Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	1 Rekomendasi	100 %	44.723.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	110.000.000,00	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi								441.519.400,00					865.000.000,00	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Presentase SKPD yang telah menerapkan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	41 perangkat daerah	100 %	66.999.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 perangkat daerah	165.000.000,00	
						SPIP pada level terdefinisi Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN													
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
						Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	5 perangkat daerah	100 %	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 perangkat daerah	125.000.000,00	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Presentase SKPD yang telah menerapkan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	12 Kegiatan	100 %	224.519.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	275.000.000,00
						SPIP pada level terdefinisi Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN												
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													
						Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	5 perangkat daerah	100 %	95.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 perangkat daerah	300.000.000,00
TOTAL													13.859.700.000,00					14.678.045.292,00

4.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar hanya membuat program dan kegiatan lingkup pembinaan dan pengawasan regular melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta pengembangan aparatur pengawasan sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi, masyarakat dapat mengajukan laporan melalui pengaduan masyarakat atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus/kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB V PENUTUP

Rencana kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan Perubahan RPJMD, disesuaikan dengan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, perhitungan kebutuhan sesuai standarisasi harga barang dan jasa yang baru, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Akhir kata, dengan tersusunnya rencana kinerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (*outcome*) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO



BAB V

PENUTUP

Rencana kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan Perubahan RPJMD, disesuaikan dengan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, perhitungan kebutuhan sesuai standarisasi harga barang dan jasa yang baru, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Akhir kata, dengan tersusunnya rencana kinerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (*outcome*) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR,
ttd.

JULIYATMONO

